LAPORAN PENELITIAN

PELAKSANAAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES DI SUMATERA BARAT

MILIK UPT. PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Oleh

Drs. Basori Mukti

PENELITIAN INI DIBIAYAI OLEH :
PROYEK PENINGKATAN/PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI
(P4T) IKIP PADANG
TAHUN ANGGARAN 1985/1986
KONTRAK PENELITIAN No.431/PT 37/P4T/1985
Tanggal 8 Agustus 1985

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(IKIP) PADANG

1986

A B S T R A K

Salah satu program pemerintah cq Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas dan meratakan kesempatan belajar anak usia SD (7 - 12 th) ialah dengan mendirikan SD Inpres.

Program pembangunan SD ini meliputi pembangunan gedung yang dilengkapi dengan penyediaan guru, alat perlengkapan buku-buku pelajaran pokok.

Perencanaan dan pelaksanaan pendirian SD Inpres ini diharapkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun biasanya akan ditemukan beberapa kendala seperti terlambatnya bangunan selesai padahal tahun ajaran sudah masuk, anak usia SD sudah menunggu untuk sekolah. Problema yang lebih khusus mungkin berkaitan dengan alokasi,lokasi, kualitas bangunan dan perlengkapannya dan sebagainya.

Seberapa jauh rencana dan pelaksanaan pendirian SD Inpres telah berhasil atau problema serta saran-saran apakah yang ditemui dalam proses pendirian tersebut? Pertanyaan-pertanyaan pokok ini telah menggugah penulis untuk melakukan suatu penelitian kasus. Penelitian dengan menggunakan para pejabat pemerintah tingkat II dan pendidikan tigkat II serta eselon di bawahnya sampai pada masyarakat sebagai responden telah dilakukan secara khusus pada 3(tiga) sekolah di tiga kecamatan Kodya Padang. Dengan teknik wawancara terpimpin data yang dibutuhkan telah diminta dari responden di atas dan setelah diolah dengan teknik statistik sederhana diperolehlah beberapa hasil yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Satu diantara tiga SD Inpres yang menjadi obyek penelitian lokasinya dinilai oleh responden sebagai kurang baik.

2. Mutu bangunan gedung dinilai sebagai cukup baik kecuali lantai plafon, WC dan sumur.
3. Alat perlengkapan sekolah dinilai baik kecuali bangku murid.
4. Pihak yang ikut serta dalam menentukan lokasi sekolah hanyalah pihak (unsur)pejabat pemerentah tingkat Kecamatan.
5. Mencari tanah untuk lokasi sekolah ditangani oleh hanya unsur pimpinan pemerentah.
6. Pengelolaan SD Inpres tersebut ialah pihak Pekerjaan Umum (PU).
7. Problema utama dalam pendirian SD Inpres ialah sulitnya mendapatkan tanah.
8. Satu diantara tiga SD dinilai kurang sesuai letaknya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan maupun pendayagunaan SD Inpres ini dimasa yang akan datang.

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL 23-11-1986
SUMBER/HARGA Hadiah
KOLEKSI KI
No. INVENTARIS 901/HH/86-PD (5)
KLASIFIKASI 371.62 Muk PD

P E N G A N T A R

Kegiatan penelitian merupakan darma yang tidak dapat ditinggalkan dalam perjalanan karir akademik staf pengajar. Darma ini harus terintekrasikan kedalam kegiatan sehari-hari dan dipergunakan oleh staf pengajar dalam proses pengambilan keputusan propesional.

Proposisi diatas mempunyai konsekwensi dalam pengelolaan penelitian di IKIP Padang. Selain berorientasi kepada pengembangan ilmu serta terapannya, Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong staf pengajar untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya. Ini berarti harus ditimbulkan citra, bahwa penelitian bukan semata-mata berguna karena metodologinya yang kelihatan canggih sehingga memberikan kesan angker, tetapi terlebih-lebih berguna untuk staf pengajar yang bersangkutan untuk memperbaiki prilaku akademiknya.
Oleh karena itu pengembangan kwalitas penelitian dilakukan dengan menyusun tuntutan kwalitas itu dengan tahapan kewenangan akademik peneliti, seperti yang ditunjukkan dengan kepangkatannya.

Saya merasa gembira penelitian ini dapat diselesaikan oleh peneliti. Terlepas dari faktor-faktor lainnya, penyelesaian suatu penelitian seharusnya juga memberikan "Sense of achievement" kepada peneliti dalam kegiatan akademiknya lebih dari pada sekedar memenuhi tugas atau kontrak.

Saya sampaikan penghargaan kepada peneliti yang telah berusaha keras menyelesaikan penelitiannya ini. Penelitian ini mudah-mudahan berguna untuk pengembangan ilmu dan lebih penting lagi berguna sebagai pengalaman pada masa yang akan datang untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi bagi peneliti.

Kepala Pusat Penelitian
IKIP Padang

Dr. Sutjipto
NIP. 130353251

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, berkat Rahmat Allah Subhanahu Wa-ta'ala, penelitian yang berjudul : " Pelaksanaan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Inpres di Sumatera Barat " ini telah dapat diselesaikan

Dalam tahap-tahap kegiatan, penelitian ini telah mendapatkan bantuan yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak tersebut, terutama kepada :

1. Rektor IKIP Padang selaku penanggung jawab pelaksanaan penelitian didalam kawasan IKIP Padang.
2. Kepala Proyek P3T IKIP Padang yang telah berusaha mendapatkan dan mengelola dana penelitian ini.
3. Kepala Pusat Penelitian yang mengkordinir pelaksanaan penelitian.
4. Wali Kota Madya Padang yang telah memberikan izin dan bantuan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan penelitian.
5. Kandepdikbud Kodya Padang beserta jajarannya yang telah memberikan informasi tentang pelaksanaan pendirian SD Inpres.
6. Camat-Camat dari Kecamatan Padang Utara, Nanggalo dan Kuranji, beserta jajarannya yang juga telah memberikan informasi tentang pelaksanaan pendirian SD Inpres di Kodya Padang.

7. Konsultan yang telah memberikan bantuan, petunjuk sehingga dapat selesainya pelaksanaan penelitian.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

Padang, 26 Januari 1986

P e n e l i t i

Drs. Basori Mukti
NIP. 130 320 506.

D A F T A R I S I

	Halaman
ABSTRAK	iii
PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Ruang Lingkup dan Pembahasan Masalah..	3
C.Penjelasan Istilah	4
D.Tujuan Penelitian	5
E.Asumsi	5
F.Pertanyaan Penelitian	6
G.Kegunaan Hasil Penelitian	6
BAB II. Tinjauan Kepustakaan	8
A.Tinjauan Kepustakaan	8
B.Kerangka Konseptual	10
BAB III. METODOLOGI	15
A.Rancangan Penelitian	15
B.Populasi dan Sampel	15
C.Jenis dan Sumber Data	19
D.Teknik dan Alat Pengumpul Data	21
E.Teknik Analisis Data	21
F.Prosedur Penelitian	21
G.Keterbatasan	22

Halaman

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 24

A. Analisis 24

B. Pembahasan / Diskusi 33

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 29

A. Kesimpulan 29

B. Rekomendasi 30

DAFTAR BACAAN 43

LAMPIRAN .....

D A F T A R T A B E L

TABEL | Halaman

1. Keadaan SD Inpres di Kodya Padang Tahun 1983 / 1984 16

2. Kecamatan dan SD Inpres yang dijadikan Sampel 17

3. Jenis dan Jumlah Responden 19

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Perwujudan dari salah satu azas keadilan sosial telah ternyata dari hasil REPELITA I s/d III, dimana bobot pelaksanaan program-program pembangunan lebih diletakkan pada pemerataan pembangunan serta penyebaran hasil pembangunan.

Oleh karena dewasa ini masih banyak anak yang belum berkesempatan belajar di SD, maka perluasan pemerataan kesempatan belajar itu diutamakan pada SD. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan utama dalam bidang pendidikan yaitu menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan merata di tingkat SD serta sekaligus meningkatkan mutu pendidikannya.

Dalam rangka ikhtiar dan usaha untuk mempercepat peningkatan kesempatan belajar di SD, khususnya bagi anak usia 7-12 tahun, maka diadakanlah program bantuan pembangunan Sekolah Dasar melalui Instruksi Presiden. Program bantuan itu meliputi pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar yang dilengkapi dengan penyediaan guru, fasilitas/sarana sekolah buku-buku pelajaran pokok dan buku bacaan anak untuk perpustakaan.

Bantuan pembangunan SD oleh pemerintah yang dituangkan dalam Inpres 10/73 dan Inpres 6/74 sangat terasa benar kegunaannya, khususnya dalam usaha pemerataan pendidikan dasar yang diperkirakan akhir PELITA, telah menyerap 80 - 95 % usia SD 7-12 tahun untuk memperoleh pendidikan (belajar) baik di SD

Negeri/Swasta termasuk Madrasyah/Ibtidaiyah.

Sasaran yang dicanangkan pemerentah inilah yang perlu dengan sekuat tenaga dan pikiran kita usahakan untuk dicapai.

Dapat dirasakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan SD Inpres 10/73 dan 6/74, mengingat disatu pihak waktunya sangat terbatas (singkat) sedangkan di pihak lain ruang lingkup yang begitu luas belum memungkinkan untuk memperhitungkan semua komponen secara sempurna, namun demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan gedung pengadaan buku-buku, penempatan guru-guru yang diperlukan serta penataran guru hampir dapat tercapai seluruhnya menurut rencana, sekalipun baru merupakan sarana dan prasarana untuk mencapai sasaran tersebut diatas.

Kita meyakini pula bahwa pemerataan pendidikan dengan program bantuan pembangunan SD ini tidak hanya dimaksudkan segi kwantitatif, kwalitatif, relevansi serta efektifitas dan efesiensi dari bantuan tersebut. Itulah sebabnya bersamaan dengan pembangunan dan pengadaan peralatan dalam program-program bantuan itupun disangkutkan segi alokasi/jumlah gedung dan lokasi gedung itu, pengadaan buku-buku dan sebagainya. Adalah sangat esensial bahwa program bantuan pembangunan SD Inpres yang disebut diatas mendapatkan pula perhatian yang serius dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Wajarlah kiranya jika perwujudan dan pembangunan proyek-proyek SD Inpres tersebut untuk diteliti dan dikatahui sebagai umpan balik.

Dengan jalan ini diharapkan program bantuan pembangunan gedung SD Inpres tersebut dapat lebih didayagunakan dalam meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia 7-12 tahun secara lebih berdaya guna, berhasil guna dimasa datang. Sekaligus untuk memperoleh gambaran pelaksanaan SD Inpres serta mengidentifikasi masalah-masalah pelaksanaannya di Sumatera Barat.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan ditingkatkannya perluasan kesempatan bagi anak usia 7-12 tahun yang belum tertampung di sekolah-sekolah yang ada serta peningkatan mutu pendidikan melalui program bantuan pembangunan SD Inpres di Sumatera Barat, maka penelitian hanya mencoba melihat beberapa aspek

1. Lokasi, alokasi, dan pisik SD Inpres ditinjau dari sudut sosial, geografi, demografi, ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Termasuk didalam proyek-proyek SD Inpres dalam arti jumlah dan mutu keadaan gedung, perabot sekolah dan sarana pendidikannya sebagai mana digariskan dalam ketentuan pelaksanaannya. Seberapa jauh ketepatan belajar bagi usia 7 - 12 tahun sekarang dan yang akan datang.
2. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan pembangunan SD Inpres, penyelenggaraan pendidikannya, tingkat ketelantaran pendidikan serta kemungkinan pemecahannya.
3. Tanggapan masyarakat serta keikut sertaannya terhadap program bantuan pembangunan SD Inpres tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengumpulkan data dari responden tentang :

1. Ketepatan alokasi, lokasi dan pisik SD Inpres 10/73 dan 6/74 sesuai dengan peraturan pelaksanaannya.
2. Seberapa jauh maksud dan tujuan program bantuan pembangunan SD Inpres dipahami oleh responden.
3. Keikutsertaan dalam program pelaksanaan SD Inpres dalam hal pengelolaan, pendirian, penyelenggaraan dan pengawasannya.
4. Masalah-masalah berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan pembanguan SD dalam hal pengadaan komponen-komponen gedungnya dan komponen pendidikannya serta saran pemecahannya
5. Saran-saran yang dikemukakan sehubungan dengan pembinaan, pendayagunaan serta pengamanan sarana pendidikannya.

E. Asumsi

Ada beberapa asumsi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mencapai tujuan perluasan kesempatan belajar bagi anak umur 7-12 tahun, pemerintah melalui Program Bantuan Pembangunan SD telah membangun gedung, Sekolah Dasar
2. Dalam pelaksanaan pendirian SD Inpres melibatkan pejabat pemerintah daerah tingkat I, tingkat II, Desa dan Pemuka masyarakat serta Kanwil Depdikbud propinsi beserta jajarannya ditingkat Kabupaten/Kodya dan Kecamatan sehingga diharapkan alokasi, lokasi SD Inpres sesuai dengan kebutuhan daerah.

B A B II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian tentang pelaksanaan pendidikan SD Inpres di Sumatera Barat yang resmi belum dilaksanakan (wawancara dengan Kanwil Depdikbud Prop.Sumbar). Dengan Demikian belum ada ada informasi balikan yang dapat dipedomani berkenaan dengan permasalahan Pelaksanaan Pendirian SD Inpres tersebut.

Berdasarkan tulisan Jiyono dan Sumarto tentang Analisis Pembangunan SD Inpres dalam rangka Perluasan Kesempatan belajar, yang dimuat dalam Analisis Pendidikan No.1/1980 halaman 130-144, mengenai pembangunan SD Inpres No.10/1973 dan 6/1974 dikatakan bahwa tidak semua dapat diselesaikan menjelang tahun ajaran baru. Alasannya antara lain kurang mantapnya koordinasi pembinaan, keadaan musim, meningkatnya harga bangunan, kesulitan transportasi, kesulitan mendapatkan tanah, kesulitan mendapatkan pemborong yang bonafide dan kesulitan mendapatkan bahan bangunan pada lokasi tertentu.

Juga dalam tulisan itu disampaikan bahwa pembangunan SD Inpres No.6 tahun 1974 pada umumnya dilaksanakan pada lokasi yang sama dengan lokasi gedung SD Inpres No.10/1973. Tetapi dibeberapa daerah terdapat gedung SD yang dibangun tidak pada lokasi SD berdasarkan Inpres No.10 tahun 1973, dengan pertimbangan karena kekurangan penduduk serta keadaan geografis Desa yang agak berjauhan dan berserakan sehingga sulit mendapatkan

murid yang ditentukan. Selain itu pula masih ada gedung-gedung SD Inpres yang dibangun berdekatan dengan gedung SD Negeri lain, ada gedung yang menempati bekas SD lama yang rusak, dibangun terlalu jauh dari tempat pemukiman penduduk dan juga terdapat sejumlah SD Inpres yang tidak mempunyai gedung sehingga menempati SD Negeri biasa.

Bangunan SD berdasarkan Inpres No.10 tahun 1973 dan No.6 tahun 1974 telah banyak ditemui kerusakan-kerusakan, bahkan ada yang rusaknya sedemikian berat sehingga tidak mungkin lagi untuk dipakai. Gedung yang menurut perhitungan akan tahan untuk jangka 20-25 tahun, kenyataannya sebagian tidak tahan 5-10 tahun. Penelitian resmi yang dilakukan oleh Kanwil Depdikbud Prop.Jawa Timur tentang Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan SD Inpres di Jawa Timur diperoleh beberapa kesan sebagai berikut :

1. Madsud dan tujuan program bantuan pembangunan SD Inpres belum dipahami oleh semua pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam program tersebut.
2. Ada keterlibatan pejabat dari tingkat II, Kecamatan dan Desa dalam pelaksanaan bantuan pemmbangunan SD Inpres tahun 1973 dan 1974.
3. Maksudnya anak ke sekolah (SD Inpres) banyak ditentukan oleh keadaan kehidupan sosial ekonomi orang tua.

4. Lokasi SD Inpres ditanggapi cukup baik hanya oleh lebih kurang 70 % responden.
5. Masih adanya ketidak tepatan dalam penentuan Alokasi, lokasi dan letak gedung SD Inpres.
6. Gejala rendahnya mutu sebagian gedung SD Inpres yang perlu diperbaiki.
7. Gejala rendahnya mutu peralatan sekolah.
8. Belum dimanfaatkannya sarana dan prasarana sekolah secara optimal.
9. Adanya pertanda berkurangnya keterlibatan dan keikut sertaan masyarakat secara wajar dalam usaha swadaya pembangunan dan pendidikan dasar.
10. Dan lain-lain.

Atas dasar gejala hasil penelitian seperti diuraikan diatas, maka penelitian pelaksanaan pendidikan SD Inpres di Sumatera Barat perlu dilaksanakan.

B. Kerangka Konseptual

Pembangunan SD Inpres dimulai pada tahun 1973 dengan Inres No.10 tahun 1973 dan No.6/1974. Dalam rencana kegiatan tersebut tidak saja pembangunan gedungnya tetapi meliputi beberapa hal.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.

BAGAN ALIR ASPEK DAN SUB ASPEK

PEMBANGUNAN SD INPRES

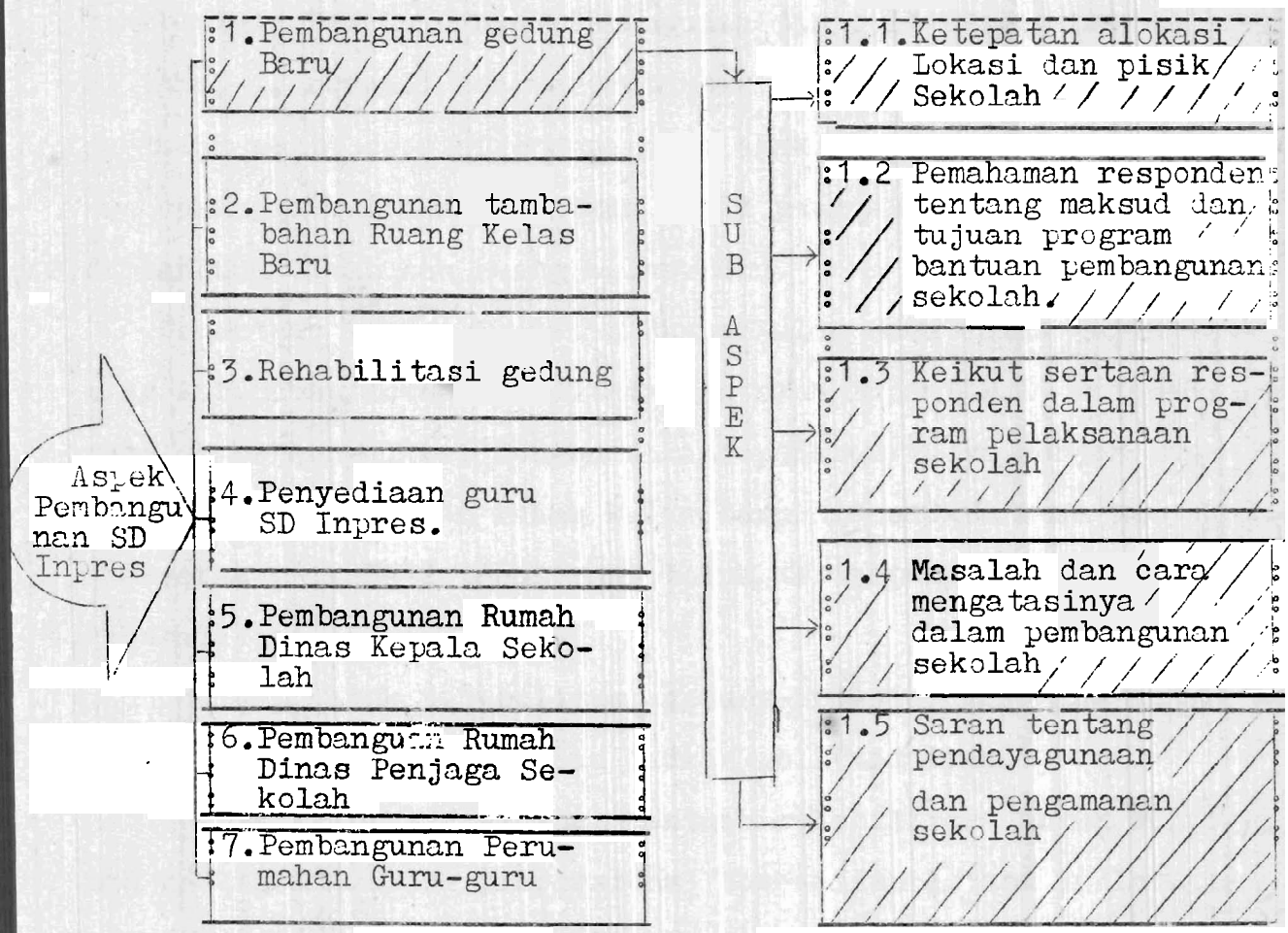

= yang diteliti

Bagan alir ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung baru.

Untuk membangun gedung baru setiap daerah sudah ditentukan alokasinya baik untuk per Dati I, Dati II, Kecamatan dan Desa.

4. Penyediaan Guru SD Inpres.

Pengangkatan guru-guru SD Inpres dilaksanakan oleh masing-masing daerah sesuai dengan jatah yang sudah ditetapkan. Bagi daerah yang kekurangan guru mendatangkan guru dari daerah lain. Kesulitannya adalah guru-guru lain daerah itu belum menguasai bahasa ibu sehingga anak-anak sulit menangkap pelajaran. Perlu waktu bagi guru untuk menyesuaikan diri.

5. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah.

Untuk menjaga supaya Kepala Sekolah dapat bekerja dengan lebih tenteram dan lebih baik pemerentah melalui proyek pembangunan SD Inpres juga mendirikan perumahan dinas untuk Kepala Sekolah.

6. Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah.

Seperti halnya pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah melalui Inpres inipun dibangun rumah dinas untuk Penjaga Sekolah. Dengan demikian pemeliharaan dan perawatan serta keamanan sekolah akan selalu dapat terpelihara dengan baik.

7. Pembangunan bPerumahan Guru-guru.

Demikian juga halnya dengan tempat tinggal para guru melalui Inpres SD ini dibangun pula. Pendirian SD Inpres sudah menjangkau daerah-daerah terpencil. Bagi guru-guru yang dilatangkan dari daerah lain tentulah sulit untuk mencari perumahan yang layak bagi mereka apalagi untuk menyewa rumah yang lebih baik terbatas kepada kemampuan keuangan untuk membayarnya. Oleh sebab itu melalui proyek SD Inpres dibangun pula perumahan untuk guru-guru oleh pemerentah.

Pembangunan gedung baru tahap I terdiri tiga lokal dan tahap II tiga lokal. Pada umumnya pembangunan tahap II adalah pada lokasi tahap I, kecuali ada pertimbangan lain karena kekurangan penduduk serta geografis desa yang agak berjauhan dan berserakan sehingga sulit mendapatkan murid yang dibutuhkan.

2. Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru.

Penentuan lokasi Tambahan Ruang Kelas Baru dalam masing-masing Kabupaten/Kotamadya ditetapkan oleh Bupati/Wali Kotamadya setelah berkonsultasi dengan Kakandepdikbud/Kodya dengan memperlihatkan kebutuhan ruang kelas baru didasarkan atas banyaknya anak-anak umur 7-12 tahun yang belum tertampung di SD yang ada.

3. Rehabilitasi Gedung.

Bantuan untuk rehabilitasi gedung SD ini tidak saja untuk negeri juga untuk swasta dan Madrasyah Ibtidaiyah.

Setiap Propinsi mendapat bantuan rehabilitasi untuk sejumlah gedung SD secara proporsional dan setiap Kotamadya/Kabupaten mendapat bantuan rehabilitasi pula untuk sejumlah gedung yang memerlukan perbaikan secara proporsional terhadap gedung SD yang memerlukan perbaikan diseluruh Propinsi yang bersangkutan. Alokasi rehabilitasi SD negeri dan swasta ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atas usul Kakandepdikbud Kabupaten/Kodya untuk SD Negeri dan Swasta serta Kakandepag untuk Madrasyah Ibtidaiyah.

MILIK UPT. PERPUSTAKAAN
— IKIP — PADANG —

4. Penyediaan Guru SD Inpres.

Pengangkatan guru-guru SD Inpres dilaksanakan oleh masing-masing daerah sesuai dengan jatah yang sudah ditetapkan. Bagi daerah yang kekurangan guru mendatangkan guru dari daerah lain. Kesulitannya adalah guru-guru lain daerah itu belum menguasai bahasa ibu sehingga anak-anak sulit menangkap pelajaran. Perlu waktu bagi guru untuk menyesuaikan diri.

5. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah.

Untuk menjaga supaya Kepala Sekolah dapat bekerja dengan lebih tenteram dan lebih baik pemerentah melalui proyek pembangunan SD Inpres juga mendirikan perumahan dinas untuk Kepala Sekolah.

6. Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah.

Seperti halnya pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah melalui Inpres inipun dibangun rumah dinas untuk Penjaga Sekolah. Dengan demikian pemeliharaan dan perawatan serta keamanan sekolah akan selalu dapat terpelihara dengan baik.

7. Pembangunan bPerumahan Guru-guru.

Demikian juga halnya dengan tempat tinggal para guru melalui Inpres SD ini dibangun pula. Pendirian SD Inpres sudah menjangkau daerah-daerah terpencil. Bagi guru-guru yang didatangkan dari daerah lain tentulah sulit untuk mencari perumahan yang layak bagi mereka apalagi untuk menyewa rumah yang lebih baik terbatas kepada kemampuan keuangan untuk membayarnya. Oleh sebab itu melalui proyek SD Inpres dibangun pula perumahan untuk guru-guru oleh pemerentah.

Dari ketujuh aspek pembangunan melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar melalui Instruksi Presiden ini yang akan diteliti hanyalah aspek pembangunan gedung baru. Dari aspek ini akan dilihat tentang : 1. Ketepatan Alokasi,lokasi dan pisik SD Inpres. 2.Pemahaman responden tentang maksud dan tujuan program bantuan pembangunan SD Inpres. 3.Keikutsertaan responden dalam program pelaksanaan SD Inpres. 4.Masalah dan cara mengatasinya dalam pembangunan SD Inpres. 5.Saran tentang pendayagunaan dan pengamanan SD Inpres.

B A B III

M E T O D O L O G I

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriktif, oleh sebab itu rancangan penelitian sederhana saja. Yaitu melihat variabel sebagai adanya variabel-variabel diteliti tersebut dapat dilihat pada ruang lingkup penelitian.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang menjadi populasi penelitian ini adalah pendirian SD Inpres tahun 1983/1984 di Kota Madya Padang, ditinjau dari segi (karaktenistik) geografis, sosial ekonomi, sosial budaya dan jarak pencapaian fungsional.

Pendirian SD Inpres di Kota Madya Padang tersebar dalam sebelas Kecamatan dengan jumlah sampai sekarang 170 buah. SD Inpres yang dijadikan obyek penelitian ini hanya yang akan didirikan tahun anggaran 1983/1984 dengan alasan antara lain SD Inpres tahun-tahun sebelumnya sudah diragukan keobyektifan responden untuk memberikan informasi yang diharapkan, sedang SD Inpres yang didirikan tahun 1984/1985 diduga belum selesai sepenuhnya.

Dengan demikian SD Inpres yang dijadikan obyek penelitian adalah seperti terlihat pada tabel berikut.

T A B E L I

KEADAAN SD INPRES DI KODYA PADANG

TAHUN 1983/1984

No.	SD INPRES	KECAMATAN	KETR
1.	SD Inpres (I) Batang Kabung	Koto Tangah	
2.	SD Inpres (I) Kt.Panjang	sda	
3.	SD Inpres (I) Kel.Ganting	sda	
4.	SD Inpres (I) Wisma Indah IV	sda	
5.	SD Inpres (II) Tj.Aur	sda	
6.	SD Inpres (II) Kp.Jambak	sda	
7.	SD Inpres (I) Tanah Sirah	Kuranji	
8.	SD Inpres (I) Sei.Sapih	sda	
9.	SD Inpres (II) O l o	Nanggalo	
10.	SD Inpres (II) Kepalo Koto	P a u h	
11.	SD Inpres (I,II) Wisma Warta	Padang Utara	

2. Sampel.

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik statified Rondom Sampling dengan mengikuti proses berikut :

a. Menetapkan (pengelompokan) Kecamatan yang ada di Kodya Padang atas tiga kelompok yaitu :

Pertama yang berada di pusat Kota, kedua di pinggiran pusat Kota, ketiga di luar pusat Kota.

MILIK UPT. PERPUSTAKAAN
- IKIP - PADANG -

b. Dari pengelompokan tersebut, selanjutnya diambil satu dari Kecamatan yang termasuk dalam kelompok itu, sehingga diperoleh tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo, dan Kecamatan Kuranji.

c. Pada masing-masing Kecamatan sampel diambil satu SD Inpres dari jumlah yang ada, sehingga diperoleh SD yang dijadikan sampel penelitian sejumlah 3 (tiga) buah SD seperti terlihat pada tabel berikut :

T A B E L II

KECAMATAN DAN SD INPRES YANG DI-
JADIKAN SAMPEL.

No.	KECAMATAN	SD INPRES	KETR
1.	Padang Utara	1	
2.	Nanggalo	1	
3.	Kuranji	1	
	Jumlah	3	

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

MILIK UPT. PERPUSTAKAAN
— IKIP — PADANG —

371.62
Muk
P1

Sebagai responden dalam penelitian ini adalah :

a. Pejabat Pemda tingkat II Kotamadya Padang yang berhubungan dengan pengelolaan pembangunan SD Inpres sebanyak satu orang.

b. Camat, sebanyak tiga orang yaitu Camat Kecamatan Padang Utara Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji.

c. Kepala Desa/Lurah, sebanyak tiga orang yaitu masing-masing satu orang untuk setiap Kecamatan. Kepala Desa/Lurah tempat dinangunnya SD Inpres yang dijadikan sampel.

d. Kakandepdikbud Kodya Padang, satu orang.

e. Kakandepdikbud Kecamatan yang dijadikan sampel sebanyak tiga orang.

f. Kepala SD Inpres sebanyak tiga orang, yaitu masing-masing satu Kepala SD Inpres yang merupakan sampel pada setiap Kecamatan.

g. Guru SD Inpres sebanyak enam orang, yaitu masing-masing dua guru pada setiap sampel SD Inpres.

h. Orang tua murid sebanyak enam orang, yaitu masing-masing dua orang tua murid dari siswa yang bersekolah pada SD Inpres yang dijadikan sampel.

i. Tokoh masyarakat sebanyak enam orang ; yang dimaksud tokoh masyarakat disini adalah mereka yang tergolong alim Ulama, pemangku Adat dan cerdik pandai. Dari ketiga golongan ini diambil dua orang untuk setiap Kelurahan dari setiap Kecamatan tempat didirikan SD Inpres yang menjadi sampel.

Jumlah keseluruhan responden 32 orang.

Untuk lebih jelasnya responden dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

T A B E L III

JENIS DAN JUMLAH RESPONDEN

No.	Jenis responden	Jumlah	Keterangan
1.	Pejabat Pemda Tk.II (Pengelola SD Inpres	1	
2.	Camat	3	
3.	Kepala Desa/Lurah	3	
4.	Kakandepdikbud Kodya	1	
5.	Kakandepdikbud Kecamatan	3	
6.	Kepala SD Inpres	3	
7.	Guru SD Inpres	6	
8.	Orang Tua Murid	6	
9.	Tokoh masyarakat	6	
	J u m l a h	32	

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data.

Jenis data yang dibutuhkan adalah :

a. Pendapat responden tentang alokasi, lokasi dan pisik SD Inpres ditinjau dari segi :

1. geografis
2. demografis
3. sosial ekonomi budaya

4. keadaan gedung
5. perabot
6. sarana pendidikan

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan pembangunan dalam bidang :
   1. pengelolaan
   2. pendirian
   3. penyelenggaraan
   4. pengawasan

c. Pemahaman responden terhadap maksud dan tujuan SD Inpres.

d. Masalah-masalah program pelaksanaan SD Inpres dan cara mengatasinya serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

e. Saran-saran responden tentang pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan SD Inpres.

2. Sumber Data

Data seperti tersebut diatas akan diperoleh melalui wawancara dengan :

a. Pejabat Pemda Tk.II Pengelola SD Inpres.
b. Camat
c. Kepala Desa/Lurah
d. Pejabat Kandep Tk.II
e. Pejabat Kandep Kecamatan
f. Kepala SD Inpres.

g. Guru-guru SD Inpres

h. Orang Tua Murid

i. Tokoh masyarakat

D. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Semua data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan teknik wawancara.

Ada empat bentuk format pedoman wawancara dalam penelitian ini yaitu :

Format A. untuk pejabat

Format B. untuk Kepala dan Guru SD Inpres

Format C. untuk orang tua murid

Format D. untuk pemuka masyarakat

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data akan digunakan teknik statistik prosentase dengan formulasi

$$\frac{F}{N} \times 100\ \%$$

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dibiayai dengan dana dari DIP IKIP Padang dan prosedur penelitiannya sebagai berikut :

1. Calon peneliti mengajukan usul proyek penelitian melalui pusat Penelitian IKIP Padang untuk diteruskan kepada pihak pemberi dana melalui jalur hirarki formal.

2. Setelah usul diterima, diadakan penanda tanganan kontrak kerja sama antara peneliti dengan pihak pemberi dana.
3. Pembuatan desain operasional yang disertai dengan penyusunan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara serta pelaksanaan uji coba alat tersebut.
4. Pelaksanaan pengumpul data setelah alat pengumpul data selesai diuji coba dan direvisi dan setelah mendapatkan surat izin penelitian dari Kantor Pusat Penelitian IKIP Padang.
5. Pengolahan dan analisis data dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan penyusunan draft laporan.
6. Draft laporan disampaikan ke Pusat Penelitian untuk diproses sesuai dengan ketentuan. Atas saran, petunjuk, perbaikan dari pusat maka akhirnya disusunlah laporan akhir untuk kemudian dikirim kepada pihak yang berkepentingan.

G. Keterbatasan

Dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa kesulitan dan hambatan yang ditemui, antara lain :

1. Untuk mengadakan wawancara dengan pejabat pada umumnya sukar untuk menentukan waktu yang tepat untuk menemuinya sehingga memerlukan kunjungan yang berulang-ulang baru dapat dilaksanakan wawancara.

2. Untuk mengadakan wawancara dengan tokoh masyarakat dan orang tua murid terpaksa diadakan sore dan malam hari karena dipagi hari mereka bekerja baik di Kantor maupun di ladang.

B A B IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses penelitian seperti telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, pada bab ini akan dikemukakan hasil penelitian dan diakhiri dengan pembahasan tentang hasil penelitian yang memerlukan pembicaraan atau diskusi tersendiri.

Sistimatika menyampaikan hasil penelitian ialah dengan mengemukakan hasil penemuan dalam bentuk esei yang didasarkan pada hasil analisis data seperti terlihat pada tabel-tabel dalam lampiran 1.1 s/d 1.7

A. Hasil Penelitian

1. Ketepatan lokasi dan pisik SD Inpres (Interpretasi data tabel I).

Semua responden baik dari kelompok kaum pendidikan dan pemerentahan menyatakan pernah mendapat keterangan tentang pendirian SD Inpres di daerahnya. Dalam hal ini kelihatannya sudah sesuai dengan peraturan pendirian SD Inpres karena pihak-pihak yang berkepentingan sudah mengetahui kehadiran SD ini di daerah nya.

Sumber informasi (informan) tentang keterangan pendirian SD tersebut kelihatannya adalah atasan masing-masing secara struktural. Kelompok kaum pendidikan mendapat informasi dari pejabat-pejabat pendidikan misalnya, Kandepdikbud Kecamatan memperoleh informasi dari Kandepdikbud Kodya.

Camat memperoleh informasi dari Wali Kota cq bagian pengelola SD Inpres. Atas dasar kenyataan ini dapat pula dikatakan bahwa pendirian SD ini sudah sebagian tepat.

Selanjutnya, hampir semua responden mengatakan pernah melihat dari dekat atau meninjau SD Inpres dilokasi masing-masing responden. Lokasi SD ini dinilai oleh sebagian besar responden (70%) sebagai cukup baik. Penilaian sebagai sebagian besar baik dikemukakan oleh ± 17 % responden. Sisanya menyatakan kurang baik pernyataannya seperti ini berasal dari seorang Kepala Sekolah, dua orang guru, dua orang tua murid dari salah satu SD Inpres.

Alasan kurang baiknya lokasi ini dinyatakan oleh responden yang bersangkutan sebagai : 1).jauh dari perkampungan, 2) jauh dari jalan besar, 3) jalan ke sekolah jelek, 4) dekat sungai/laut, 5) dekat dengan SD lain dan 6) pekarangannya sempit.

Mutu bangunan gedung SD, secara umum dinyatakan oleh responden sebagian baik kecuali untuk bagian/unit seperti :
1) lantai gedung, 2)plafon, 3) WC dan 4) sumur dinilai oleh sebagian besar responden sebagian kurang baik. Dari segi bangunan ini kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa pendirian SD ini belum begitu memuaskan responden.

Mutu perlengkapan peralatan dinilai sebagai berikut :

1. Bangku murid umumnya dinilai sebagian kurang baik.
2. Meja-meja kursi guru umumnya dinilai sebagian baik.

3. Papan tulis, baik
4. Almari, baik
5. Rak buku umumnya dinilai sebagian "kurang dan tidak" baik demikian juga alat peraga dan alat olahraga.

Dari kenyataan ini, terlihatlah bahwa peralatan perlengkapan yang vital bagi terciptanya proses belajar yang baik belumlah memadai (tepat).

Walaupun responden menilai lokasi dan pisik SD Inpres ini sebagai kurang memuaskan, namun mereka menilai SD ini sama baiknya dengan SD Negeri dan bahkan ± 50 % menyatakan bahwa SD Inpres lebih baik dari SD Negeri. Demikian pula niat orang tua memasukkan anaknya ke SD Inpres ini, dinilai sebagian ada atau berniat. Dan mereka telah melihat pula beberapa keuntungan dari pendirian SD Inpres ini.

Diantara keuntungan ini disebutkan sebagai :

1. tertampungnya anak usia sekolah (7-12) di daerah mereka.
2. dengan adanya SD ini, anak tidak jauh lagi pergi sekolah.
3. sekolah dapat digunakan sebagai ruang tempat pertemuan serta latihan-latihan kursus di desa/Lurah Kecamatan.

Secara keseluruhan kesan kita ialah bahwa pendirian SD Inpres ini adalah tepat.

2. Pemahaman tentang tujuan pendirian SD Inpres (Interpretasi dari tabel II).

Hampir semua responden menyatakan bahwa tujuan pendirian SD Inpres ini adalah sebagai usaha pemerintah meningkatkan daya tampung SD dan mengurangi keterlambatan anak usia sekolah (7-12) tahun mendapatkan kesempatan belajar.

Sebagian besar dari mereka, berpendapat pula bahwa tujuan pendirian SD ini adalah juga untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat dasar.

Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa responden umumnya mengetahui tujuan pendirian SD Inpres ini.

3. Keikut-sertaan responden dengan pengelolaan, pendirian, penyelenggaraan dan pengawasan SD Inpres (Interpretasi tabel III).

Responden pimpinan baik pimpinan kelompok pendidikan maupun pemerentahan menyatakan bahwa selama pendirian SD Inpres ada diantara mereka yang aktif dan ada pula yang tidak secara terperinci partisipasi (keaktifan) mereka itu adalah sebagai berikut :

Didalam menentukan alokasi, hanya diikuti oleh sebagian kecil pimpinan pemerentahan. Bagian terbesar dari kelompok pimpinan ini dan juga pimpinan kelompok pendidikan menyatakan tidak aktif dalam pendirian SD tersebut. Menentukan lokasi kelihatannya hanya diikuti oleh pejabat tingkat Kecamatan. Mencari tanah untuk pendirian SD umumnya dilakukan oleh pejabat pemerentahan. Semua unsur pejabat diatas tidak terlibat dalam keanggotaan (staf) proyek pembangunan SD kecuali salah seorang Kakandepdikbud tingkat Kecamatan.

Tidak seorangpun diantara responden yang terlibat sebagai anggota panitia tender pembangunan SD, Demikian pula halnya sebagai pemborong bangunan, penyedia bahan bangunan. Pengawasan umumnya dilaksanakan oleh semua unsur pimpinan.

Dari kenyataan-kenyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum responden pejabat (pimpinan) sudah ikut serta dalam pendirian SD Inpres sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disampaikan oleh responden bahwa yang terlibat dalam pengelolaan SD Inpres tingkat Kodya ialah Kepala Pekerjaan Umum, Kandepdikbud tingkat II, Kasubditbang tingkat II, Kasi PDPLB Kandepdikbud tingkat II dan Ka kesra Kantor Wali Kota.

Unsur-unsur yang terlibat dalam pendirian gedung SD Inpres dikatakan oleh responden ialah : 1. pemborong, 2. Camat, 3.Lurah, 4. Kadinas Depdikbud tingkat II dan PU tingkat II.

Pengawasan pendirian SD, terdiri dari : 1. Camat, Lurah, Kadinas PDPLB tingkat II, PU tingkat II dan pemborong.

Pengawas peralatan umumnya pemborong demikian disampaikan oleh sebagian besar responden, dan pengadaan buku sumber adalah Kabid PDPLB Kodya.

Dari kenyataan-kenyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa responden umumnya ikut serta dalam pengelolaan pendirian penyelenggaraan, dan pengawasan SD Inpres sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Problem Dalam Pendirian SD Inpres (interpretasi dari data tabel IV dan V).

Problem-problem berkenaan dengan pengawasan komponen gedung,komponen pendidikan SD Inpres dapat dikemukakan sebagai berikut :

Problema utama yang dihadapi oleh responden (para Pejabat) sehubungan dengan pendirian SD Inpres ialah sukarnya mendapatkan tanah untuk pendirian gedung.

Droping uang pembanguan SD tidak diketahui oleh sebagian besar responden. Bagi yang mengetahui masalah ini dikatakan sebagai tidak terlambat. Dari segi ini dapat diambil kesimpulan bahwa tentang droping uang pembangunan tidak begitu bermasalah.

Permasalahan lain ialah sukarnya mengangkut bahan bangunan ke lokasi pembangunan SD, walaupun mendapatkannya tidak mengalami kesukaran.

Pemborong bangunan dianggap sebagai bonafide,walaupun kwalitas bangunan gedung dinilai kurang baik.

Bagi yang mengetahui jangka waktu proyek pembangunan dikatakan bahwa penyelesaian gedung tidak terlambat.

Penilaian tentang letak gedung dikatakan sebagian sesuai, ini disampaikan oleh ± 64 % responden sisanya menyatakan kurang sesuai.

Lebih kurang 55 % saja dari responden yang menyatakan perabot gedung sebagian berkwalitas baik, sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa kwalitasnya kurang baik.

SD Inpres yang menjadi obyek penelitian sudah memiliki Kepala Sekolah dan guru-gurunya ada yang masih guru baru, tetapi juga sudah ada guru yang sudah lama berdinas. Semua SD ini belum ada penjaga sekolahnya yang resmi.

Pelajaran yang diberikan di SD ini dikatakan oleh semua responden sebagian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan agama di SD Inpres ini mendapatkan perhatian dari para pengusahanya dan masyarakat cukup memberikan dukungan terhadap kehadiran sekolah ini karena masyarakat diberi tahu tentang kehadirannya tersebut.

Mendapatkan murid dikatakan oleh hampir semua responden sebagian tidak memperoleh kesukaran walaupun ada sekolah lain yang berdekatan.

Kerja sama antara pamong desa dan Kepala Sekolah dalam pengembangan sekolah dikatakan sebagian ada walaupun ada sebagian kecil responden yang tidak tahu menahu tentang kerja sama ini. Kerja sama antara pejabat yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan SD ini dikatakan oleh semua responden sebagian ada.

Tahun ajaran dikatakan tidak pernah terlambat, ini berarti bahwa pembangunan gedung tidak mengganggu tahun ajaran.

Berdasarkan hasilan seperti dikemukakan pada poin 4, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pendirian SD Inpres ini adalah masalah pengadaan tanah, kemudian disusul oleh kesukaran pengangkutan bahan bangunan.

Secara khusus permasalahan seperti dikemukakan diatas disampaikan oleh responden pendidik (guru dan kepala sekolah) adalah sebagai berikut :

Oleh Kepala Sekolah dikatakan bahwa sekolah mereka tidak terlambat mendapatkan guru, malah dua dari tiga Kepala Sekolah tersebut menyatakan terlalu cepat mendapatnya.

Kepala Sekolah menilai bahwa guru-gurunya tidaklah semuanya guru baru, walaupun guru yang bersangkutan menilai dirinya sebagai guru baru.

Tentang usaha mendapatkan tanah untuk SD Inpres dikatakan oleh hampir semua Kepala Sekolah dan guru sebagai sulit. Lokasi SD dikatakan oleh kepala sekolah sebagian "tepat" tetapi umumnya para guru menyatakan kurang tepat.

Seorang diantara kepala sekolah melaporkan bahwa pada SD nya belum tersedia fasilitas tempat tinggal (rumah) untuk penjaga sekolah.

5. Saran responden sehubungan dengan masalah pembinaan, pendayagunaan dan pengamanan sarana pendidik.

a. Pemeliharaan gedung

Untuk pemeliharaan gedung sekolah semua responden menyarankan agar sekolah membuat pagar.

Kandepdikbud Kecamatan, menyarankan agar sekolah semacam ini harus memiliki dana rutin untuk pemeliharaannya. Orang tua murid menyarankan bahwa untuk pemeliharaan gedung perlu mengikut sertakan masyarakat, BP 3 sekolah dengan secara bersama-sama meningkatkan program K3 di sekolah itu. Selanjutnya para Lurah berpendapat bahwa untuk terpeliharanya gedung perlu pengawasan yang lebih ketat, dan penjaga sekolah dikatakan harus ada, hal yang terakhir ini juga diharapkan oleh pamong desa.

b. Pendayagunaan gedung diwaktu senggang.

Diluar jam sekolah, gedung dapat digunakan sebagai tempat kegiatan PKK, demikian disampaikan oleh Kandepdikbud tingkat II.

Sebagai tempat pertemuan masyarakat, hampir disetujui oleh semua pihak walaupun tidak seluruhnya yang sependapat seperti itu.

Orang tua dan pemuka masyarakat, berpendapat bahwa diluar waktu sekolah gedung dapat dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan non formal seperti pelaksanaan program kejar paket A.

c. Pengamanan Sarana Pendidikan.

Kandepdikbud tingkat II, Wali Kota menyarankan agar untuk amannya perabot sekolah serta perlengkapannya, hendaklah ada penjaga sekolah disetiap sekolah. Hampir semua responden sependapat bahwa untuk keamanan sumber belajar serta alat peraga diperlukan adanya gedung/ruang tertentu di sekolah. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keamanan sarana, alat perlengkapan ini harus kerja sama untuk mengamankannya dengan segera diperbaiki bila ada yang rusak.

Akhirnya disarankan pula agar rumah kepala sekolah harus ada di komplek SD, di sekolah punya pustaka serta pustakawannya.

B. Pembahasan

Beberapa hasil penemuan yang perlu dibahas atau didiskusikan adalah sebagai berikut :

1. Lokasi SD
2. Mutu bangunan SD serta perlengkapannya
3. Penentuan alokasi
4. Kesukaran mendapatkan tanah
5. Kwalitas gedung dan alat perlengkapannya

1. Lokasi SD

Secara umum memang dapat disimpulkan bahwa lokasi SD Inpres dianggap cukup baik, namun masih ada suara dari

MILIK UPT. PERPUSTAKAAN
— IKIP — PADANG —

seorang kepala sekolah, dua orang guru, dua orang tua murid (dari suatu lokasi SD) menilai lokasi tersebut sebagian "kurang baik" walaupun penelitian ini hanya dari beberapa orang dan beberapa pihak saja, namun karena orang-orang ini adalah orang-orang yang merasakan langsung buruk baiknya lokasi rasanya perlu dipertimbangkan. Pertimbangan orang lapangan perlu mendapat perhatian dalam penempatan lokasi tersebut. Secara umum orang dapat menilai sesuatu itu baik, tetapi pandangan orang yang terlihat langsung dalam sesuatu itu mungkin akan lain penilaiannya. Kepala Sekolah dengan gurulah sesungguhnya yang paling tahu tentang persyaratan sebuah sekolah.
Begitu pula, orang tua yang menyekolahkan anaknya pada suatu sekolahlah yang paling merasakan strategis tidaknya sekolah tersebut.

2.Mutu bangunan serta perlengkapan peralatannya.

Mutu bangunan seperti lantai, WC dan sumur dinyatakan sebagai kurang baik. Hal ini merupakan suatu masalah. Lantai (fondasi)adalah hal yang penting dalam sebuah bangunan.
WC dan sumur sekolah adalah alat yang vital yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan sekolah.
Permasalahan ini perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh dalam pendirian suatu gedung SD.

Proses belajar mengajar jelas akan terganggu bila hal tersebut tidak diperhatikan.

Bangku sekolah adalah merupakan alat perlengkapan yang paling penting di sekolah karena hal ini umumnya dinilai oleh responden sebagian kurang baik, maka hal ini perlu dipertimbangkan dalam pendirian SD dimasa yang akan datang. Tempat duduk murid, sangat erat kaitannya dengan kesenangan ketenangan, keamanan, serta proses belajar selanjutnya, hal ini akan berpengaruh pula terhadap hasil belajar siswa.

3. Penentuan/penetapan SD

Penetapan alokasi SD hanya ditentukan oleh unsur pemimpin pemerentahan, walaupun tidak semua terlibat (diikutsertakan). Hal ini rasanya perlu mendapatkan perhatian, karena pengalokasian akan lebih sesuai bila pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan diikutsertakan. Malah pimpinan pendidikanlah rasanya yang perlu lebih aktif dalam hal ini, karena mereka yang lebih banyak tahu tentang dunia pendidikan.

4. Kesukaran mendapatkan tanah.

Mendapatkan tanah untuk bangunan pemerentah, memang sulit terutama di Kodya Padang. Hal ini disebabkan antara lain mahalnya harga tanah tersebut dan prosedur pengurusan untuk mendapatkannya amat sulit bila tanah tersebut bukan tanah pemerentah.

Apalagi jika tanah yang diharapkan itu harus terletak pada lokasi tertentu yang diharapkan maka kesulitan akan semakin banyak. Karena tanah ini adalah untuk kepentingan pendidikan anak-anak dari masyarakat dimana suatu SD ditempatkan maka seyogianyalah jangan dipersukar. Dengan penuh pengertian dan kesadaran dari pemilik tanah diharapkan agar tanah untuk kepentingan bersama ini jangan dipersulit mendapatkannya. Rugi secara materil akan diimbangi dengan untung moral yang tidak ternilai harganya di dunia dan akhirat.

5. Kwalitas gedung.

Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa bangunan gedung yang dikelola oleh suatu proyek, kwalitasnya tidak akan seperti yang diharapkan (sesuai dengan rencana semula). Tanpa menyebutkan siapa yang salah pemerentah cq pimpinan proyek pemborong atau pihak lain, namun untuk bangunan gedung sekolah hendaknya diistimewakan. Maksudnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung ini, jangan terlalu bisnis malah sebaliknya, biarlah kita rugi dalam hasil yang bersifat materil tetapi beruntung dalam segi moral karena dampaknya tidak akan pernah habis.
Sekolah akan dipakai oleh suatu generasi ke generasi berikutnya.

Produk sekolah (tamatan) inilah kelak akan menentukan dihari esok.

Kita patut bergimbira terhadap kebijaksanaan pemerentah akhir-akhir ini, dimana-mana pembanguan pisik pendidikan sudah diserahkan pada Departemen Pekerjaan Umum (PU).
Dengan kebijaksanaan ini, diharapkan kwalitas gedung sekolah serta alat perlengkapannya sesuai dengan keadaan yang seharusnya.

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penemuan serta pembahasannya seperti di kemukakan pada bab terdahulu, bab ini akan diawali dengan beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran-saran seperlunya.

A. Kesimpulan.

1. Sebanyak ± 70 % respomden menilai bahwa lokasi SD Inpres didaerahnya masing-masing sebagai cukup baik. Mutu bangunan umumnya dinyatakan sebagian baik kecuali : lantai, Plafon WC dan sumur dinilai sebagian kurang baik. Mutu alat perlengkapan dinilai sebagai "baik" kecuali bangku murid.
2. Hampir semua responden telah mengetahui tujuan utama pendirian SD Inpres, demikian pula tujuan-tujuan lainnya.
3. Keikutsertaan responden didalam penentuan alokasi kelihatannya sangat terbatas. Didalam penentuan alokasi ini hanya diikuti oleh sebagian kecil responden pimpinan pemerentah. Demikian pula dalam hal penentuan lokasi kelihatannya hanya diikuti oleh pejabat tingkat Kecamatan. Mencari tanah untuk bangunan SD dilakukan oleh pejabat pemerentahan saja. Semua responden dari unsur pejabat tidak terlibat dalam keanggotaan (staf) proyek pembangunan gedung SD kecuali salah seorang dari Kakandepdikbud tingkat Kecamatan.

Tidak seorangpun dari responden yang terlibat sebagai anggota panitia tender pembangunan SD Inpres tersebut.
Demikian pula halnya sebagai pemborong bangunan dan penyediaan bahan bangunan. Pengawasan umumnya dilakukan oleh semua unsur pimpinan pendidikan, pemerentah. Pengelolaan SD Inpres tingkat Kodya ialah Kepala PU pejabat Kakandepdikbud tingkat II dengan pejabat pemerentahan tingkat II.

Pengawasan pendirian SD dilakukan oleh Camat, Lurah, Dinas PDPLB tingkat II, PU dan pemborong. Pengadaan alat perlengkapan sekolah dilakukan oleh pemborong dan pengadaan buku sumber serta media dilaksanakan oleh bidang PDPLB Kodya.

4. Problema utama dalam pendirian SD Inpres ialah kesukaran mendapatkan tanah bangunan. Droping uang (dana) pembangunan tidak diketahui oleh sebagian besar responden, bagi yang mengetahui mereka mengatakan bahwa droping tersebut tidak terlambat. Pengangkutan bahan bangunan ke lokasi salah satu SD mengalami kesukaran akibat sarana jalan yang tidak baik.
   Pemborong dianggap sebagai bonafit walaupun kwalitas bangunan SD kurang baik. Lebih kurang 64 % responden menilai letak gedung sebagian sudah sesuai [illegible]i berarti ada sebuah SD yang kurang sesuai letaknya.
   Perabot atau (alat perlengkapan) gedung dinilai oleh ± 45 % responden sebagai berkwalitas kurang baik.

Semua SD belum ada penjaga sekolahnya yang resmi (pegawai tetap). Tahun ajaran tidak pernah terlambat karena terlambatnya bangunan sekolah selesai. Dalam hal ketenangan tidak ada masalah karena baik kepala sekolah maupun gurunya sudah ada. Masih ada salah satu SD yang belum memiliki fasilitas tempat tinggal atau rumah penjaga sekolah.

B. Saran-saran

1. Kiranya dalam penetapan lokasi SD Inpres orang-orang penting pendidikan diikutsertakan. Bagaimanapun baiknya orang lain melihat sesuatu akan lebih baik penglihatan orangnya sendiri. Syarat-syarat pendirian sebuah sekolah jelas akan lebih diketahui oleh para pendidik dibanding dengan pihak lain.
2. Penetapan lokasi hendaknya dilakukan melalui musyawarah, mufakat antara berbagai unsur yang erat kaitannya dengan pendidikan. Kesalahan lokasi memungkinkan tujuan pendirian SD Inpres tidak tercapai. Kiranya problema-problema seputar lokasi yang mengakibatkan adanya SD Inpres tidak dimanfaatkan walaupun sudah siap, atau dipakai tetapi tidak memenuhi harapan semula atau murid/guru tidak ada, tidak akan terjadi.
3. Khusus untuk bangunan yang namanya bangunan sekolah hendaknya harus mendapatkan perhatian tersendiri. Mutu/kwalitas bangunan hendaknya harus baik, karena baik buruknya bangunan ini akan berpengaruh pada proses

dan hasil pendidikan anak-anak kita. Mendirikan sekolah mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pembangunan disegala aspek, karena kunci semua pembangunan adalah orang (masyarakat) nya dan orangnya ini ditentukan oleh pendidikannya. Pembangunan gedung maupun fasilitas sekolah (pendidikan) jangan hendaknya dibisniskan.

4. Diharapkan pengertian dan kesadaran masyarakat kota khususnya yang kebetulan pemilik tanah dimana SD akan didirikan, untuk tidak mempersulit pengadaan tanah untuk bangunan ini. Masyarakat harus merasa bangga dan berterima kasih jika didesanya didirikan SD, karena kehadiran sekolah ini akan membawa dampak positif yang tidak ternilai dan terhitung banyaknya.

   Sekolah sesungguhnya berfungsi sebagai lembaga sosial pusat kebudayaan disamping fungsi edukatif formal. Disini anak-anak masyarakat akan dibina sehingga kelak menjadi anggota masyarakat yang berguna yang dapat membangun masyarakatnya disegala bidang. Penyerahan tanah secara sepontan seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat diberbagai desa atau daerah perlu dipertimbangkan oleh masyarakat kota.

5. Saran langsung oleh responden yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut

a. Untuk memelihara gedung dan halaman sekolah perlu dibuatkan pagar sekolah, masyarakat sekitarnya bersama warga sekolah bersama-sama memelihara sekolah. Harus ada penjaga sekolah yang tetap beserta fasilitas yang memungkinkan dia aktif dalam pemeliharaan sekolah ini K 5 di sekolah ditingkatkan.

b. Gedung SD Inpres dapat hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pendidikan pada umumnya, diluar jam sekolah. Pada gedung ini dapat dilakukan kegiatan-kegiatan PKK, pertemuan/rapat masyarakat apalagi untuk kepentingan sekolah tempat kegiatan-kegiatan program-program pendidikan non formal seperti pelaksanaan program Kejar Paket A.

DAFTAR BACAAN

1. Azinar Sayuti, Beberapa Kriteria Pengelolaan Sekolah, (Suatu Pengujian Statistik Tentang Hubungan Kriteria Penempatan Ruang Belajar).
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Analisis Pendidikan, tahun 1 No. 1 1980 Jakarta.
3. Surat Keputusan Wali Kota Madya Padang No. 188.45.1.78/SK.Sek.84 Tentang Pemindahan Lokasi Inpres Pendidikan tahun 1983/1984 tanggal 29-5-1984.
4. Team Peneliti Perwakilan Departemen P dan K Jawa Timur Laporan Penelitian SD Inpres 10/73 dan 6/74 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan SD Inpres di Jawa Timur, Surabaya, 1975.
5. ..... Kumpulan Berkas Petunjuk dan Instruksi Pengelolaan Inpres No. 10/1973 dan No. 6/1974 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan SD Inpres di Jawa Timur Propinsi Jawa Timur, Surabaya 1975.

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG
DIPINJAMKAN
KHUSUS DALAM PERPUSTAKAAN

Lampiran.1

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG
PENDIRIAN SD INPRES

NO. Urut	ASPEK	DATA	RESPONDEN: PENDIDIKAN: KAN DEP II	KAN DEP III	KEP SEK	GURU	PEMERINTAHAN: OTM	WK	CAM	LUR	TM	JLH	KET
1:1	Mendapat Ket.ttg. SD Inpres	a.Pernah	1	3	3	6	6	1	3	3	6	32	
		b.Tidak Pernah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2:2	Sumber keterangan.	a.Kanwil depdik bud.Prop	-	2	-	1	1	-	-	-	1	5	boleh cek lebih dari satu.
		b.Pej.Dinas Dikdas.Prop	1	2	-	1	-	1	-	-	-	5	
		c.Pej.Pemda Tk.II	1	3	-	-	-	1	3	2	3	13	
		d.PejaDinas.Dikdas.Tk. II	1	2	3	1	-	1	1	1	-	10	
		e.Pej.Pem-Tk.Cam	-	2	2	2	3	-	-	2	3	14	
		f.Penilik Sekolah	-	2	-	1	1	-	-	-	-	4	
		g.Pej.Pem desa	-	-	1	1	3	-	-	1	5	11	
		h.Pim/Guru SD Inpres	-	-	-	3	3	-	-	1	1	8	
		i.Pengurus. BP3	-	*	1	1	2	-	-	1	-	5	
		j.Agt. masy. lain.	*	-	-	2	-	*	-	1	1	4	

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI KHUSUS
TIDAK DIPINJAMKAN
DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN
MILIK UPT. PERPUSTAKAAN
— IKIP — PADANG —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3	Tujuan pendiri-an SD Inpres	a. Meningkatkan mutu Pdd	1	2	1	5	4	1	2	2	4	22	bo-leh cek le-bih dari satu
			b. Meningkatkan daya tampung SD	1	3	2	6	5	1	3	2	6	29	
			c. Mengurangi keterlantaran sekolah anak 7-12 tahun.	1	3	2	6	6	-	2	2	6	28	
			d. Akhir Pelita IV 85%7-12 tertampung	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
			e. Akhir Pelita 100%7-12 tertampung	1	1	2	2	-	1	-	-	-	7	
4	5	Melihat/meninjau SD Inpres.	a. Pernah	1	3	3	6	5	1	3	3	6	31	
			b. Tdk. Pernah.	-	-	-	-	1	-	½=	-	-	1	
5	6	Lokasi SD Inpres	a. Cukup baik	-	2	1	4	3	1	3	2	5	21	
			b. Kurang baik	-	-	1	2	2	-	-	-	-	5	
			c. Sbg. besar baik	1	1	1	-	-	-	-	1	1	5	
6	7	Sebab kurang baik.	a. Jauh dari perkampungan.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
			b. Jauh dari jalan	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	
			c. Jalan ke sekolah jelek	1	1	-	-	-	1	-	-	1	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			d. Dekat sungai/laut	-	1	1	2	2	-	-	-	1	7	
			e. Dekat kuburan	-	-	-	-	-	-		-	1	1	
			f. Dekat pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			g. Dekat rel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			h. Dekat pembuangan sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			i. Dekat SD lain	-	1	-	1	2	1	-	1	-	6	
			J. Dekat pabrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			k. Dekat hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			l. Pekarangan sempit	-	1	1	1	1	-	-	1	1	6	
7	8	Unsur bangunan gedung SD Inpres	Atap											
			a. baik	1	3	3	6	5	1	3	2	6	30	
			b. kurang baik	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
			c. Tidak tahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dinding											
			a. Baik	1	3	2	6	5	1	2	2	6	28	
			b. kurang baik.	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	
			c. tidak tahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Lantai											
			a. Baik	-	1	-	3	1	1	-	1	3	11	
			b. kurang baik	1	2	2	3	4	-	3	2	3	20	
			c. tidak tahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Plafton											
			a.baik	1	1	2	4	3	1	2	1	3	18	
			b.kurang baik	-	1	1	2	2	-	1	2	3	12	
			c.tidak tahan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Ventilasi											
			a.baik	1	3	3	6	5	1	2	2	6	29	
			b.kurang baik	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	
			c.tidak tahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WC											
			a,baik	-	1	1	2	2	-	-	1	2	9	
			b.kurang baik	1	2	2	4	3	-	3	2	3	20	
			c.tidak tahan	-	1	1	-	-	1	3	-	2	8	
8	9	Mutu peralatan SD Inpres	Bangku Murid											
			a.baik	-	1	1	2	2	1	3	-	1	11	
			b.kurang baik	1	2	1	4	3	-	-	3	5	19	
			c.tidak tahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
			Meja/Kursi guru											
			a,baik	-	1	2	6	2	1	2	1	5	20	
			b.kurang baik	1	2	1	-	3	-	1	1	1	10	
			c.tidak tahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
			Papan Tulis											
			a.baik	1	3	2	6	3	1	-	3	5	24	
			b.kurang baik	-	-	1	-	2	-	3	-	1	7	
			c.tidak tahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Almari											
			a. baik	-	3	2	5	3	1	2	2	4	22	
			b. kurang baik	1	-	1	1	1	-	1	1	2	8	
			c. tidak tahan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
			Rak Buku											
			a. baik	-	-	1	3	-	1	2	1	3	11	
			b. kurang baik	1	1	1	-	4	-	-	-	3	10	
			c. tidak tahan	-	1	1	3	1	-	1	2	-	10	
			Alat Praga											
			a. baik	1	2	1	1	2	-	-	1	1	9	
			b. kurang baik	-	-	1	3	-	-	3	1	3	11	
			c. tidak tahan	-	1	1	2	3	1	-	1	2	11	
			Olah Raga											
			a. baik	1	1	2	3	*	-	-	1	-	8	
			b. kurang baik	-	-	1	1	2	-	-	1	4	9	
			c. tidak tahan	-	2	-	2	3	1	3	1	2	14	
9	10	Sekolah yang lebih disenangi oleh masyarakat	a. SD Inpres	-	-	3	3	2	1	1	1	4	15	
			b. SD Negeri	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	
			c. SD Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			d. Madrasyah Ibtidaiyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			e. Sama saja SD Inpres SD Negeri.	1	3	-	3	4	-	1	1	2	15	
			f. tidak tahu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	11	Minat orang tua memasukkan ke SD Inpres	a. Ada	1	3	3	6	-	1	3	3	6	26	Untuk orang tua murid tidak ada item ini
			b. Tidak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	12	Keuntungan adanya SD Inpres	a. tertampung	1	3	3	6	-	1	2	2	5	23	Untuk orang tua murid tidak ada item boleh cek lebih dari
			b. tidak perlu sekolah lebih jauh	1	2	3	6	-	1	3	1	6	24	
			c. Ruang SD Inpres dapat digunakan utk. pertemuan	1	3	3	3	-	1	2	2	5	20	
			d. Ruang SD Inpres dapat digunakan utk. lat/kursus	1	2	2	3	-	1	3	1	4	17	
			e. Anak mendapat kesempatan yang lebih bermutu	-	-	1	1	-	1	1	1	1	6	
			f. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lampiran.2

KEIKUT SERTAAN RESPONDEN
DALAM PENDIRIAN SD INPRES

NO. URUT	ASPEK	DATA		RESPONDEN: PENDIDIKAN: KANDEPDIKKOTADYA	RESPONDEN: PENDIDIKAN: KANDEPDIKCAM	RESPONDEN: PEMERINTAHAN: WK	RESPONDEN: PEMERINTAHAN: CAM	RESPONDEN: PEMERINTAHAN: LUR	RESPONDEN: PEMERINTAHAN: JMLH
1:1	Ikut akti dalam kegi atan sela ma pendiri an SD In-pres	a.Menentukan Alokasi	ya	-	-	1	2	1	4
			tidak	1	3	-	1	2	7
		b.Menentukan lokasi	ya	1	3	-	1	3	8
			tidak			1	2	-	3
		c.Mencari tahan	ya	-	1	-	2	3	6
			tidak	1	2	1	1	-	5
		d.Staf proyek	ya	-	1	-	-	-	1
			tidak	1	2	1	3	3	10
		e.Agt.Panitia Tender	ya	-	-	-	-	-	-
			tidak	1	3	1	3	3	11
		f.Pemborong Pemba-ngunan	ya	-	-	-	-	-	-
			tidak	1	3	1	3	3	11
		g.Penyediaan bahan	ya	*	-	-	-	-	-
			tidak	1	3	1	3	3	11
		h.Mengawasi bangu-nan	ya	-	3	1	2	2	8
			tidak	1	-	-	1	1	3
		i.Agt.panitia pene-rimaan gedung	ya	1	3	-	-	1	5
			tidak	-	-	1	3	2	6
		j.Lain-lain	ya	=	-	-	-	-	-
			tidak	-	* -	-	-	-	-
2:3	Yang terli-bat dalam pengelola-an SD Inp-res Tk.Kab Kodya	a.Kep.SUBDITBANG		1	3	-	2	-	6
		b.Kep.KESRA		1	2	-	1	-	4
		c.Kep.PU		1	3	1	3	3	11
		d.Kep.Seksi PDPLB/Kab-Kodya		-	2	-	1	3	6
		e.Lain-lain:P&K Tk.II		1	2	1	1	2	7
3:4	Yang ter libat dlm. pendirian gedung	a.Camat		1	2	1	3	1	8
		b.Kep.Dinas P&K Tk.II		1	2	1	2	1	7
		c.Pemborong		1	3	1	2	3	10
		d.Kades/Lurah		1	2	1	3	1	8
		e.Lain-lain: PU Tk.II		-	2	-	-	-	2

MILIK UPT. PERPUSTAKAAN
— IKIP — PADANG —

Lampiran.3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KESULITAN-KESULITAN DALAM PELAKSANAAN SD INPRES

No.	ASPEK	DATA	RESPONDEN: PENDIDIKAN: KANDEPKODYA	KANDEPCAM	PEMERINTAHAN: WK	CAM	LUR	JI
1.	Sukar mendapatkan tanah	a.ya	1	3	-	3	2	9
		b.tidak	-	-	1	-	1	2
		c.tdk.tahu	-	-	-	-	-	-
2.	Droping uagg terlambat	a.	-	-	-	-	-	-
		b.	-	-	1	2	2	5
		c.	1	3	-	1	1	6
3.	Sukar mengangkut bahan	a.	1	-	-	1	-	2
		b.	-	3	1	2	3	9
		c.	-	-	-	-	-	-
4.	Sukar mendapatkan bahan-bahan.	a.	-	-	-	-	-	-
		b.	-	3	1	3	3	10
		c.	1	-	-	-	-	1
5.	Pemborong kurang bonafid	a.	-	-	-	-	-	-
		b.	-	1	1	3	3	8
		c.	1	2	-	-	-	3
6.	Kwalitas gedung kurang baik.	a.	-	-	-	-	2	2
		b.	1	1	1	3	1	7
		c.	-	2	-	-	-	2
7.	Penyelesaian gedung terlambat	a.	1	-	-	-	1	2
		b.	-	-	1	3	2	6
		c.	-	3	-	-	-	3
8.	Letak gedung kurang sesuai.	a.	1	1	-	1	1	4
		b.	-	2	1	2	2	7
		c.	-	-	-	-	-	-
9.	Kwalitas peralatan kurang baik.	a.	1	2	-	1	1	5
		b.	-	1	1	2	2	6
		c.	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Belum ada Kepala Sekolah	a.	-	-	1	-	1	2
		b.	1	2	-	1	2	6
		c.	-	1	-	2	-	3
11	Guru-gurunya masih baru	a.	1	2	1	-	-	4
		b.	-	1	-	1	3	5
		c.	-	-	-	2	-	2
12	Tidak ada Penjaga Sekolah	a.	-	-	-	-	-	-
		b.	1	3	1	2	3	10
		c.	-	-	-	1	-	1
13	Pelajaran kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	a.	*	-	-	-	-	-
		b.	1	2	-	2	3	8
		c.	-	1	1	1	-	3
14.	Kurang perhatian terhadap pendidikan agama.	a.	-	-	-	-	-	-
		b.	1	2	1	3	3	10
		c.	-	1	-	-	-	1
15	Kurang dukungan masyarakat.	a.	-	-	-	-	-	-
		b.	1	3	1	3	3	11
		c.	-	-	-	-	-	-
16.	Kurang penerangan pada masyarakat	a.	-	-	-	-	-	-
		b.	1	2	1	3	3	10
		c.	-	1	-	-	-	1
17.	Sukar mendapatkan murid	a.	-	1	-	-	-	1
		b.	1	2	-	2	3	8
		c.	-	-	1	1	-	2
18.	Sudah ada sekolah lain	a.	1	1	-	1	-	3
		b.	-	2	1	2	3	8
		c.	-	-	-	-	-	-
19.	Kurang ada kerja sama antara pamong desa dan pimpinan SD Inpres	a.	-	-	-	-	-	-
		b.	-	2	-	3	3	8
		c.	1	1	1	-	-	3
20	Kurang ada kerja sama antara pejabat.	a.	-	-	-	-	-	-
		b.	1	3	1	3	3	11
		c.	-	-	-	-	-	-
21	Terlambatnya permulaan tahun ajaran	a.	-	-	-	-	-	-
		b.	1	3	1	2	3	10
		c.	-	-	-	1	-	1

Lampiran.4

PENDAPAR GURU DAN KEPALA SEKOLAH TENTANG MASALAH GURU DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SD INPRES

No.	JENIS MASALAH	RESPONDEN/DATA							
		KEP.SEK			GURU				
		ya	tdk	tdk tahu	ya	tdk	tdk tahu	JUMLAH	NILAI
1.	GURU								
	a. Terlambat mendapatkan guru	-	3	-	-	6	-	9	
	b. Terlalu cepat mendapatkan guru.	2	1	-	1	5	-	9	
	c. Semua/sebagian besar guru adalah baru	-	3	-	6	-	-	9	
	d. Guru-guru belum berpengalaman.	1	2	-	4	2	-	9	N=9
	e. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG.								
	a. Sulit mendapat tanah	2	1	-	5	1	-	9	
	b. Droping uang terlambat	-	1	2	-	3	3	9	
	c. Sulit mengangkut bahan	-	3	-	1	4	1	9	
	d. Sukar mendapatkan bahan	-	2	1	1	4	1	9	
	e. Pemborong kurang bonafid	-	1	2	1	2	3	9	
	f. Lokas kurang tepat	-	3	-	4	2	-	9	N=9
	g. Kurang ada kerja sama sesama pejabat	-	-	3	-	2	4	9	
	h. Tidak tersedia pasilitas tempat tinggal penjaga sekolah.	2	1	-	3	3	-	9	
	i. Lain-lain.	-	-	-	-	-	-	-	

Lampiran.5

SARAN-SARAN RESPONDEN

No.	ASPEK	DATA	RESPONDEN							
			PENDIDIKAN			PEMERINTAHAN				
			KANDEP TK II	KANDEP CAM	OTM	WK	CAM	LUR	PH	JM
1.	Pemeliharaan gedung	a. Membuat pagar	1	1	2	1	1	-	3	9
		b. Riol-riol hrs. ada	1	-	-	-	-	-	-	1
		c. WC dan air has. tersedia.	1	-	-	-	-	-	-	1
		d. Hrs. ada dana rutin	-	2	-	-	-	-	1	3
		e. Mengikutsertakan masyarakat	-	1	2	-	1	1	-	5
		f. Hrs. ada perhatian BP 3.	-	-	2	1	-	1	1	5
		g. Meningkatkan K 3	-	-	2	-	-	-	-	2
		h. Usul rehap ke Camat	-	-	-	1	-	-	-	1
		i. Pengawasan lebih ketat	-	-	*	-	-	2	1	3
		j. Penjaga sekolah harus ada.	-	-	-	-	-	2	2	4
		k. Hendaknya ada team yg. mengawasi langsung.	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Pendayagunaan gedung diwaktu luang	a. Pelaksanaan PKK	1	-	-	-	-	-	-	1
		b. Pertemuan masy.	1	-	2	1	1	1	5	11
		c. Penggunaan melalui	-	2	-	-	-	1	1	4
		d. Pdd. Non formal	-	1	3	-	-	-	3	7
		e. Dikmas Paket A KBUP	-	1	1	-	-	-	-	2
		f. Penataran-penataran	-	-	-	1	-	1	1	3
		g. TPA dan TPSA	-	-	-	-	1	-	-	1
		h. Pertemuan LKMD	-	-	-	-	-	1	2	3
		i. Tidak diperlukan	-	-	-	-	-	1	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Pengguna an perabot sekolah dan Paket buku	a. Hrs.ada penjaga sekolah	1	-	-	1	-	-	-	2
		b. Rumah penjaga sekolah	1	-	-	1	-	-	-	2
		c. Hrs.ada gudang/ perpustakaan	-	3	2	-	1	2	2	10
		d. Hrs.ada dana rutin	-	1	-	-	-	-	-	1
		e. Semua Pihak sama-sama menjaga	-	-	1	-	1	1	1	4
		f. Hrs.ada laporan Dinas dari Kep.Sek.	-	-	1	-	-	-	-	1
		g. Memperbaiki yang rusak	-	-	-	-	-	1	2	3
4.	Lain-lain	a. Rumah guru dan Kep.Sek tempatnya Harus tepat.	-	1	-	-	-			1
		b. Harus ada perpustakaan dan pustakawan.	-	1	1	-	-	-	-	2
		c. Harus ada dana untuk tanah	-	-	-	-	1	-	-	1
		d. Perintah untuk lanjutkan bangunan	-	-	-	-	-	1	-	1
		e. Menggiatkan Tabanas dan Taska	-	-	-	-	-	1	-	1
		f. Penerangan listrik	-	-	-	-	-	-	1	1
		g. Penempatan guru hendaknya yang profesional.	-	-	-	-	-	-	1	1